

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Pembayaran/Penyetoran dan Pelaporan PPh yang Dipotong/ Dipungut*
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009*
- Direktorat Jenderal Pajak. *Nomor 29/PJ/1995 tentang replikasi Sistem Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak memerintahkan kepada setiap Kantor Pelayanan Pajak melakukan Ekualisasi Pajak*
- Mannasy, R. 1999. *Kebijakan Fiskal*. Jakarta: YP4
- Mansury. 1999. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Jakarta: IND HILL-CO
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Soemitro, Rochmat. 2016. *Asas dan Dasar Hukum Pajak*. Jakarta: Refika Aditama
- Suandy, Early. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.